

**PENGARUH AUDIT KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS
PUBLIK DENGAN PENGAWASAN FUNGSIONAL SEBAGAI
VARIABEL MODERATING**

(Studi Empiris pada OPD Kabupaten Solok)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Dari Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi*



OLEH:

REREN JULITA

NIM: 171000462201014

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN

SOLOK

2021

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Audit Kinerja terhadap Akuntabilitas publik dengan Pengawasan Fungsional sebagai Variabel Moderating penelitian ini memakai metode kuantitatif dengan menggunakan pendekatan yang bersifat sebab-akibat (kausal) atau penelitian asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel baik mempengaruhi atau dipengaruhi

Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh Audit Kinerja (X) terhadap Akuntabilitas Publik (Y) hasil pengujian pertama membuktikan dengan nilai signifikan t sebesar $0,042 < 0,05$ dan $|t_{\text{hitung}}|$ sebesar $2,098 > 1,677$. Setelah itu, terdapat pengaruh Audit Kinerja (X) terhadap Akuntabilitas Publik (Y) yang dimoderasi oleh Pengawasan Fungsional (Z). Hasil pengujian ini hipotesis kedua nilai R^2 persamaan regresi (1) dengan nilai R^2 persamaan (2). Hasilnya adalah nilai F^2 persamaan regresi (1) lebih kecil dari nilai F^2 persamaan regresi (2) ($0,089 < 0,472$).

Kata Kunci : Audit Kinerja, Akuntabilitas Publik, Pengawasan Fungsional.

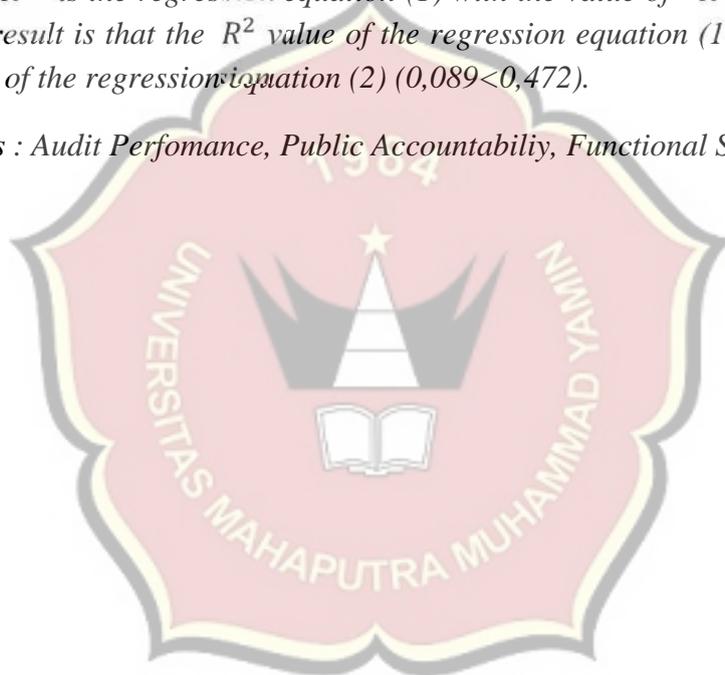


ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Audit Performance on Public Accountability with Functional Supervision as a Moderating Variable. This study uses quantitative methods using a causal approach or associative research which aims to determine the relationship between variables. Whether influencing or attracting.

The results of this study indicate the influence of Audit Performance (X) on Public Accountability (Y). The results of the first test prove the significant value of t of $0,042 < 0,05$ dan $|t_{hitung}|$ of $2,098 \geq 1,677$. After that, there is the effect of Audit Performance (X) on Public Accountability (Y) which is moderated by Functional Supervision (Z). The results of this test are the second hypothesis, the value of R^2 is the regression equation (1) with the value of R^2 is the equation (2). The result is that the R^2 value of the regression equation (1) is smaller than the R^2 value of the regression equation (2) ($0,089 < 0,472$).

Keywords : Audit Performance, Public Accountability, Functional Supervision



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan pada sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi mendorong perlunya perbaikan dalam pengelolaan dan pertanggung jawaban, maka dalam era otonomi daerah sekarang ini daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar urusan pemerintah pusat, pemberi otonomi daerah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan-kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Untuk itu, otonomi daerah diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, membudayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan (Mahmud dan Junaidi 2017).

Sebenarnya sebagai akibat dari perkembangan proses demokratis di berbagai bidang serta kemajuan profesionalisme. Dengan demikian pemerintah sebagai pelaku utama pelaksanaan *good governance* ini dituntut untuk memberikan pertanggung jawaban yang lebih akurat. Hal ini semakin penting untuk dilakukan dalam era reformasi ini melalui pemberdayaan peran lembaga-lembaga kontrol sebagai pengimbang kekuasaan pemerintah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian, laporan keuangan

pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian, berhubung laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Maka komponen laporan yang disajikan setidaknya-tidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (Sofia 2014).

Akuntabilitas publik merupakan pertanggung jawaban pemerintahan kepada masyarakat terkait dengan aktivitas-aktivitas dan kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya melalui penyajian laporan keuangan, dimana masyarakat mempunyai hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban. Fenomena yang terjadi dalam perkembangan akuntabilitas publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik dipusat maupun daerah. Dalam keberhasilan akuntabilitas pada sektor publik dibutuhkan suatu kejelasan sasaran dan tujuan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Seiring dengan munculnya tuntutan dari masyarakat agar organisasi sektor publik mempertahankan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik serta *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya serta untuk menjamin dilakukannya pertanggung jawaban publik oleh organisasi sektor publik, maka diperlukan pengawasan terhadap organisasi sektor publik tersebut (Laksana 2014).

Akuntabilitas menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab terhadap laporan keuangannya mulai dari perencanaan anggaran, pemakaian anggaran serta pelaporan anggaran secara penuh. Akuntabilitas terikat laporan keuangan tidak hanya mencakup penyajian laporan keuangan. Dalam hal ini laporan yang

mengandung informasi relevan dan memenuhi kebutuhan pengguna, melainkan juga laporan yang secara langsung tersedia dan dapat diakses-diakses oleh pihak-pihak yang menggunakan informasi tersebut. Selain melalui penyajian laporan keuangan, akuntabilitas yang efektif juga tergantung pada kemudahan dari seseorang, dalam memperoleh informasi terkait dalam laporan keuangan.

Masyarakat sebagai pihak yang memberikan amanah kepada pemerintah berhak untuk memperoleh informasi keuangan sebagai bentuk akuntabilitas. Namun, publikasi laporan keuangan oleh pemerintah daerah melalui surat kabar, internet, atau cara lain belum menjadi hal umum bagi sebagian daerah. Padahal seperti yang kita ketahui penyelenggaraan pemerintahan serta akuntabilitas pemerintah yang dapat dilihat melalui laporan keuangannya tidak dapat diketahui tanpa adanya pemberitahuan dari pemerintah kepada masyarakat mengenai informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan sumber dana masyarakat beserta penggunaannya (Sofia 2014).

Komponen akuntabilitas dan administrasi publik memiliki peran penting dalam hal layanan publik. Audit kinerja berguna sebagai alat manajemen, terutama untuk memahami proses penetapan tujuan dari pemerintah daerah, dan hasil audit dapat meningkatkan kinerja pemerintahan daerah. Kemampuan mempertanggung jawabkan (akuntabilitas) dari sektor publik pemerintahan sangat tergantung pada kualitas audit sektor publik. Tanpa kualitas audit yang baik maka akan timbul permasalahan, seperti munculnya kecurangan, korupsi, kolusi dan berbagai ketidak beresan dipemerintahan. Kualitas audit sektor publik dipengaruhi oleh kapabilitas teknis auditor baik secara pribadi maupun kelembagaan (Sofia 2014).

UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, audit kinerja merupakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan Negara yang terdiri atas aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Audit kinerja menitikberatkan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit. Dimana audit kinerja meliputi audit atas aspek ekonomi, dalam hal ini pengguna informasi dalam laporan keuangan akan memperoleh informasi yang berkualitas.

Audit kinerja atau sering dikenal dengan audit performance audit atau *value for money* audit merupakan jenis yang relatif baru dalam sektor publik. Selama ini dalam sektor publik pengauditan yang dilakukan terbatas pada audit keuangan dan audit kepatuhan. Pengauditan keuangan dikonsentrasikan pada atestasi mengenai validitas dan kewajiban laporan keuangan. Sementara itu audit kepatuhan dilakukan untuk menguji kepatuhan terhadap kebijakan manajemen dan peraturan perundang-undangan yang disyaratkan. Selama ini sektor publik tidak luput dari tuduhan sebagai sarang korupsi, kolusi, nepotisme, inefisiensi dan sumber pemborosan Negara. Audit kinerja memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang di audit. Audit kinerja meliputi audit atas aspek ekonomi, efektivitas, yang pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya yang membedakan antara audit kinerja dengan audit lainnya dalam hal laporan audit.

Pengawasan Fungsional merupakan pengawasan oleh instansi independen dari unsure yang diawasi seperti badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) Inspektur Jendral Departemen, unit pengawasan lembaga Negara dan

Inspektirar Wilayah. Sedangkan menurut instruktur presiden Nomor: 15 tahun 1983 yang dimaksud dengan pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh para aparat yang diadakan khusus untuk membantu pemimpin dalam menjalankan fungsi pengawasan dilingkungan organisasi yang menjadi tanggung jawabnya. Menemukan bahwa audit kinerja dan pengawasan fungsional secara persial dan bersama sama silmultan memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap akuntabilitas publik pada pemerintahan (Sofia 2014).

Aparat pengawasan fungsional intern terhadap pelaksanaan audit pemerintahan dan implikasinya kepada akuntabilitas keuangan instansi pemerintah daerah menjelaskan bahwa profesinalitas aparat pengawasan fungsional intern berpengaruh positif terhadap pelaksanaan audit pemerintahan. Pengawasan fungsional berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas publik. Sehingga dengan adanya pengawasan fungsional oleh inspektorat daerah pada khususnya dapat mendorong terwujudnya akuntabilitas publik yang bebas dari praktek korupsi, kolusi , dan nepotisme (Wulandari 2013).

Maka dari hasil penelitian terdahulu dan fenomena yang terjadi peneliti ingin meneliti ulang mengenai pengaruh audit kinerja terhadap akuntabilitas publik dengan pengawasan fungsional di OPD Kabupaten Solok. Hal ini di karenakan dalam penelitian dilakukan didaerah yang berbeda dengan variabel audit kinerja (X), Akuntabilitas publik (Y), pengawasan fungsional (Z) dan teknik analisis data yang berbeda. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“Pengaruh Audit Kinerja terhadap Akuntabilitas Publik dengan Pengawasan Fungsional sebagai variabel Moderating (Studi Empiris pada OPD Kabupaten Solok)”**.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka rumusan masalah yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah audit kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas publik pada OPD Kabupaten Solok.
2. Apakah pengawasan fungsional dapat memoderisasi hubungan antar audit kinerja terhadap akuntabilitas publik.

1.3 Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui Pengaruh audit kinerja terhadap Akuntabilitas Publik pada OPD Kabupaten Solok.
2. Untuk mengetahui hubungan audit kinerja terhadap akuntabilitas publik dapat dimoderasi oleh pengawasan fungsional pada OPD Kabupaten Solok.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini bisa bermanfaat, baik dari aspek teoritis maupun aspek praktis bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

1. Kegunaan Teoritis

Dalam aspek teoritis, kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian serupa dan sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi yang mengambil judul penelitian ini.

- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi pengembangan teori yang ada terkait pelaksanaan audit kinerja, akuntabilitas publik dengan pengawasan fungsional.

2. Kegunaan Praktis

Dalam aspek praktis, kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber acuan dalam meningkatkan akuntabilitas publik pada pemerintahan Kabupaten Solok.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber evaluasi untuk pengawasan fungsional di pemerintah Kabupaten Solok.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran tentang permasalahan yang akan dibahas secara keseluruhan dalam penelitian ini, maka diperlukan suatu sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Bab II : Landasan Teori

Bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, hipotesis, dan kerangka berpikir.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, dan teknik pengukuran data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini terdiri dari gambaran umum objek penelitian, karakteristikn responden, dan hasil analisis data.

Bab V : Penutup

Bab ini terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran penelitian.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data penelitian skripsi tentang Pengaruh Audit Kinerja terhadap Akuntabilitas Publik dengan Pengawasan Fungsional Sebagai Variabel *Moderating*, dengan lokasi penelitian pada OPD Kabupaten Solok dengan jumlah responden sebanyak 47 orang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama (H1) diungkapkan bahwa terdapat pengaruh Audit Kinerja (X) terhadap Akuntabilitas Publik (Y). Dengan hasil pengujian hipotesis ini, dapat disimpulkan bahwa audit kinerja memiliki peran yang lebih penting sebagai alat jaminan dalam hal akuntabilitas kepada publik.
2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua (H2) diungkapkan bahwa terdapat Audit Kinerja (X) terhadap Akuntabilitas Publik (Y) yang dimoderasi oleh Pengawasan Fungsional (Z). Dengan hasil pengujian hipotesis ini, dapat disimpulkan bahwa semakin meningkat interaksi audit kinerja dengan pengawasan fungsional maka akuntabilitas publik yang dilakukan oleh OPD akan semakin meningkat. Pengawasan fungsional yang terdapat di OPD Kabupaten Solok seperti persiapan pemeriksaan, pelaksanaan dalam pemeriksaan, pelaporan dan tindak lanjut pemeriksaan dalam laporan keuangan.

5.2 Saran

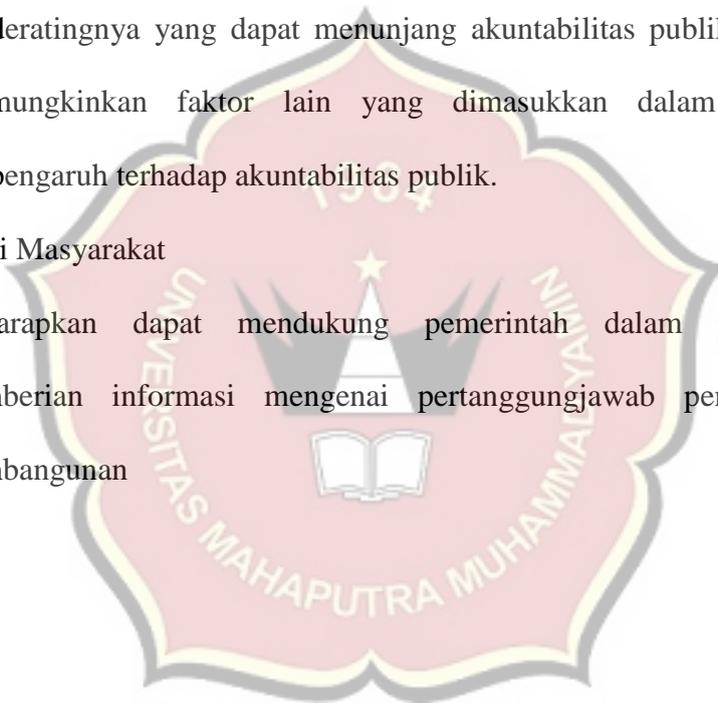
Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka beberapa saran yang dapat disampaikan untuk penelitian yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat menambahkan jumlah sampel yang diteliti dan menambahkan faktor-faktor lain sebagai variabel independen dan moderatingnya yang dapat menunjang akuntabilitas publik, karena sangat memungkinkan faktor lain yang dimasukkan dalam penelitian ini berpengaruh terhadap akuntabilitas publik.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat mendukung pemerintah dalam penyelenggaraan pemberian informasi mengenai pertanggungjawab pemerintah dalam pembangunan



DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, M., Sari, P., Kajian, P., & Iii, A. (N.D.). *Evaluation Of Job Descriptions Of Organization*. 11(1), 49–71.
- Ahmad, Khaldoun, Al Daoud, and Amman Jordan. 2015. “*The Moderating Effect of an Audit Committee on the Relationship between Non-Audit Services and Corporate Performance.*” 6(14): 170–80.
- Arik Subiyani SE,M.Si (2015) "*Audit Kinerja Sektor Publik dan Pengawasan Fungsional terhadap Akuntabilitas Publik Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Bondowoso*"
- Dista Amelia Arafah (2012) "*Penerapan Audit Kinerja (Audit Operasional) pada Sektor Swasta dan Pemerintah*"
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 25 (Edisi 9)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ibrahim. 2011. “*Pengaruh Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar.*” : 408–18.
- Ismet Sulilia (2010) "*Audit Kinerja Sektor Publik*"
- Kholmi, M. (2017). *Akuntabilitas dalam perspektif teori agensi*. *Journal of Innovation in Business and Economics*, 2(02).
- Laksana, Agung Puja, dan Bestari Dwi Handayani. 2014. “*Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengawasan Fungsional, Dan Pelaporan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik Di Kabupaten Batang.*” 3(2): 177–86.
- Lestari, Risha Dwi. 2019. “*Analisis Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, Pengawasan Fungsional, Dan Pelaporan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik (Studi Empiris Pada OPD Di Kabupaten Temanggung).*”
- Mahmud, Sunarti, dan Abdul Wahid Mahsuni Junaidi. 2017. “*Pengaruh Audit Kinerja Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Publik DengaSn Pengawasan Fungsional Sebagai Variabel Moderating.*” : 107–18.
- Mardiasmo.2018. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*.Yogyakarta: ANDI.
- Perwita, Rida, Sri Hastuti, dan Oryza Tannar. 2019. “*Audit Quality Based on Internal Audit Capability Model (IACM) and Gender as Mediatinag Variabel in the Public Sector.*” 2(1): 22–38.
- Rahmawati, dan Andika Rusli. 2014. “*Pengaruh Audit Kinerja Terhadap Penerapan Good Corporate Governance Pada Kab . Luwu.*” 04(02): 82–99.

- Sari, Fitri Indah. 2012. “Pengaruh Efektivitas Audit Kinerja Dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Publik.” : 1–17.
- Shatnawi, Saddam et al. 2019. “The Moderating Effect of Enterprise Risk Management on the Relationship between Audit Committee Characteristics and Corporate Performance : A Conceptual Case of Jordan The Moderating Effect of Enterprise Risk Management on the Relationship between Audit Committee Characteristics and Corporate Performance : A Conceptual Case of Jordan.” 9(5): 177–94.
- Sofia, Devie Maya. 2014. “Pengaruh Audit Kinerja Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Publik Dengan Pengawasan Fungsional Sebagai Variabel Moderating Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Pemerintah Kabupaten Ponorogo.”
- Sujarweni, V. Wiratna. 2016. *Kupas Tuntas Penelitian Akuntansi Dengan SPSS*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sugiyono, Dr., Prof.. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suratmi, Ni Made et al. 2014. “Pengaruh Audit Kinerja , Penyajian Laporan Keuangan , Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan.” 2(1).
- Studi, P., Fakultas, A., Dan, E., & Magelang, U. M. (2018). *Pengaruh Locus Of Control Eksternal , Etika Audit , Kinerja Auditor Dan Turnover Intention Terhadap Dysfunctional Audit Behaviors (Studi Empiris Pada Bpk Perwakilan Provinsi Diy Dan Jawa Tengah) Pengaruh Locus Of Control Eksternal , Etika Audit , Kinerja Auditor Dan Turnover Intention Terhadap Dysfunctional Audit Behaviors (Studi Empiris Pada BPK Perwakilan Provinsi DIY Dan Jawa Tengah)*.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Audit Kinerja
- Wulandari, Indah. 2013. “Pengaruh Pengawasan Fungsional Dalam Menunjang Akuntabilitas Publik Pada Pemerintahan Kota Padang Artikel.”